

KEBANGKITAN POLITIK KANAN-JAUH DAN DAMPAKNYA BAGI MULTIKULTURALISME DI EROPA¹

Rizky Hikmawan

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: rizkyhikmawan@gmail.com

Abstract

Since 1970s the far right movement began to reappear in Europe. The emergence of the movement became an interesting phenomenon in Europe. This is because the history of the movement that affiliated with facism that leads to World War II. Therefore, the emergence of this movement should be observed considering the thoughts that lead to chauvinism that in turn may lead to racism and xenophobia, which is contrary with democracy. One of the consequences of the emergence of the far right movement is the threat to multiculturalism and the stability in Europe. Today, far right politics become a potential alternative for European society in the midst of economic stagnation and several social issues, including immigration. This paper seeks to explain the background of the far-right politics in Europe, the cause of its rise and its impact on multiculturalism in Europe.

Keywords: far-right politics, European politics, multiculturalism

¹ Draft awal artikel ini dipresentasikan pada acara Konvensi Studi Eropa ke-4 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 18 Agustus 2016.

Pendahuluan

Sejak dekade 1970-gerakan kanan-jauh mulai muncul kembali dalam ruang sosial politik Eropa. Kemunculan gerakan tersebut menjadi fenomena tersendiri dalam politik Eropa. Hal ini mengingatkan sejarah gerakan kanan-jauh yang terafiliasi dengan fasisme yang menjadi sumber terjadinya Perang Dunia II. Awalnya partai-partai kanan-jauh hanya mampu memperoleh suara dengan jumlah kecil. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan konstelasi politik yang ada, secara perlahan kanan-jauh mampu mengonsolidasikan dirinya, baik dalam bentuk pemikiran maupun lembaga (partai). Hasilnya, dalam 10 tahun terakhir, kekuatan politik kanan-jauh semakin menguat dan siap menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat Eropa.

Setidaknya ada empat fenomena politik dalam beberapa tahun terakhir yang dihasilkan politik kanan-jauh yang membuat mereka tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. *Pertama*, keberhasilan Partai *National Front* (FN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) daerah tahun 2014 dimana mereka meraih suara mayoritas di 12 kota. *Kedua*, fenomena keberhasilan FN di Prancis berlanjut dalam Pemilu Eropa pada Mei 2014 dimana partai kanan-jauh tersebut berhasil menjadi mayoritas dengan 26% suara (The Economist, 2014). *Ketiga*, keberhasilan Norbert Hofer, calon dari *Freedom Party of Austria* (FPÖ) yang berlandaskan politik kanan-jauh, memenangkan putaran pertama Pemilu Presiden Austria 2016 dengan perolehan suara mencapai 35.1%. Tetapi, dalam putaran kedua Hofer kalah tipis dari calon independen yang didukung Partai Hijau, Alexander van der Bellen, dengan presentase suara 46.7% melawan 53.3% (BBC, 2016). *Keempat*, keberhasilan *Alternative for Deutschland* (AfD) yang berhasil memperoleh suara signifikan dalam Pemilu di empat negara bagian Jerman sepanjang tahun 2016. Hasil tersebut membuat AfD kini memiliki perwakilan di 10 dari 16 negara bagian Jerman.

Keempatfenomena di atas membenarkan pendapat Mudde (2013: 2) yang menyatakan bahwa saat ini politik kanan-jauh telah berpindah dari kelompok marginal menjadi kelompok utama dalam politik Eropa. Pendapat Mudde tersebut didasari oleh tiga faktor. *Pertama*, meningkatnya suara partai-partai kanan-jauh dalam pemilu lokal, nasional, maupun regional. *Kedua*, bangkitnya organisasi-organisasi kanan-jauh dan terjadinya beberapa kekerasan atas namakanan-jauh. *Ketiga*, adanya upaya normalisasi dan pengembalian wacana politik kanan-jauh ke masyarakat Eropa. Dengan demikian keberadaan politik kanan-jauh dapat mengancam stabilitas di Eropa mengingat basis ideologi ultra-nasionalis (fasisme) yang mereka anut. Begitupula dengan eksistensi dari Uni Eropa (UE) mengingat cara pandang *euro-skepticism* yang mereka kampanyekan.

Secara umum, istilah 'kanan-jauh' merupakan suatu konsep yang memayungi pemikiran dan gerakan, seperti: kanan radikal, populisme, kanan ekstrim, sayap kanan populis, dan kanan radikal populis (Mudde, 2007). Beberapa varian tersebut nantinya akan dikerucutkan menjadi dua tipe, yaitu: kanan radikal populis dan kanan ekstrim. Kanan radikal populis adalah kelompok yang menekankan otoritarianisme dan nativisme serta mempromosikan nilai tradisional dan agama. Sementara kanan ekstrim merupakan kelompok eksklusif yang hanya menerima keanggotaan secara terbatas dan mengedepankan kebijakan diskriminatif kepada etnis minoritas dan imigran yang dianggap sebagai "*the others*."

Dalam artikel ini ini penulis berupaya menjelaskan tiga hal. *Pertama*, sejarah dan perkembangan politik kanan-jauh yang dibagi ke dalam lima periode: kemunculannya di akhir abad ke-19, lahirnya fasisme paska Perang Dunia I, reformulasi pemikiran dan gerakan kanan-jauh paska Perang Dunia II, kemunculan generasi baru politik kanan-jauh pada dekade 1970/80-an, dan periode paska Perang Dingin sebagai momentum kebangkitan bagi

gerakan kanan-jauh di panggung politik Eropa. *Kedua*, menjelaskan penyebab kembalinya politik kanan-jauh dalam politik Eropa dalam beberapa tahun terakhir. *Ketiga*, menjelaskan dampak kebangkitan politik kanan-jauh bagi masa depan multikulturalisme di Eropa.

Sejarah dan Perkembangan Politik Kanan-Jauh

Menurut Kallis (2014) sejarah perkembangan politik kanan-jauh dapat dilihat dalam lima periode. *Pertama*, periode kemunculan di akhir abad ke-19 dimana pemikiran kanan-jauh mulai mengganggu pemikiran kanan secara umum. Nasionalisme ternyata belum cukup untuk mewujudkan persatuan dan kemakmuran negara. Dibutuhkan suatu pemikiran dan tindakan yang lebih tegas untuk mewujudkan hal itu. Ketika itu Eropa sedang berada dalam perang pemikiran antara kubu kanan dan kiri dalam lingkup monarki yang masih memainkan peranan signifikan, baik di tingkat domestik maupun regional.

Kedua, kemunculan fasisme sebagai gelombang baru gerakan radikal yang menyerang pemikiran maupun gerakan konservatif, komunis dan liberal dengan menawarkan revolusi baru yang berdasarkan hibriditas pemikiran-pemikiran yang ada dengan menekankan pada posisi dan peran kebangsaan. Salah satu pemicu kekuatan kanan-jauh adalah ketika Negara *axis* yang kalah pada Perang Dunia I merasa terhina akibat perlakuan para pemenang perang kepada mereka melalui Perjanjian Versailles. Munculnya perasaan terhina ditambah dengan kondisi dalam negeri paska perang yang memprihatinkan memunculkan tokoh-tokoh yang ingin mengembalikan harga diri sekaligus kejayaan negaranya seperti yang terjadi di masa lalu.

Italia menjadi tempat kelahiran revolusi kanan-jauh ketika Benito Mussolini berhasil merebut kekuasaan melalui kudeta yang dikenal dengan sebutan "*March on Rome*" pada tahun 1922. Ide-ide yang ditawarkan Mussolini, yang

dikenal dengan Fasisme, mampu menarik perhatian dari mayoritas masyarakat Italia sehingga kudeta tersebut mendapatkan dukungan dari Raja Victor Emmanuel III, militer, pebisnis, dan kelompok politik sayap kanan. Harapan pun digantungkan pada Mussolini untuk bisa mengembalikan kejayaan Italia sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Romawi.

Fenomena politik yang terjadi di Italia hendak diikuti oleh Adolf Hitler di Jerman pada November 1923. Akan tetapi, berbeda dengan hasil yang diperoleh Mussolini, kudeta yang dilakukan Hitler justru menemui kegagalan. Dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan "*Munich Putsch*" tersebut Hitler bersama para pimpinan kudeta berhasil ditangkap. Hitler kemudian dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun dengan dakwaan pengkhianatan. Namun hanya sembilan bulan di penjara, Hitler dibebaskan dengan membawa visi baru untuk Partai Nazi. Hasilnya, 10 tahun setelah peristiwa kudeta, Hitler ditunjuk sebagai Kanselir Jerman pada Januari 1933 setelah kegagalan Kurt von Schleicher dalam membentuk pemerintahan efektif. Dalam Pemilu 6 Maret 1933 Nazi menjadi partai terbesar dengan perolehan suara mencapai 43.9% (Stackelberg, 2007).

Keberhasilan Mussolini dan Hitler dalam mengembangkan ideologi fasisme tidak terlepas dari konteks Eropa saat itu. Ketiadaan sistem politik yang stabil, lemahnya kepemimpinan di tingkat elit, serta depresi ekonomi yang melanda Eropa di awal 1930-an menjadi variabel penunjang bagi berseminya fasisme. Di kala politik kanan dan kiri saling mengedepankan ego kelompok, fasisme justru menawarkan persatuan sebagai langkah awal untuk memperkuat sekaligus mengembalikan kejayaan negara. Permasalahannya pemikiran fasisme yang mengedepankan semangat chauvinis justru mengantarkan Eropa pada Perang Dunia II.

Ketiga, Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan fasisme. Secara institusi (partai maupun organisasi) mengasingkan diri dari hingar bingar

politik Eropa yang merayakan liberalisme bersama komunisme sebagai ideologi harapan yang nantinya akan bersaing dalam periode Perang Dingin. Namun sebagai sebuah pemikiran, fasisme, yang berakar dari semangat ultra-nasionalis, tetaplah hidup. Para penganut kanan-jauh mencoba mereformulasikan kebijakan-kebijakan yang berbasis pemikiran ultra-nasionalis dalam lingkungan sosial politik yang berubah paska perang. Sebuah lingkungan yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran liberal demokrat. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Kallis (2014):

“A period of ideological experimentation ensued, during which a wide range of relatively small formations of the radical right operated in many European countries, typically in the fringes of the political system and lacking a coherent ideological agenda with which to launch a viable challenge on the seemingly unassailable postwar liberal democratic consensus.”

Keempat, pada tahun 1970-an bentuk pemikiran-pemikiran baru ultra-nasionalis mulai diimplementasikan. Berbeda dengan partai-partai beraliran fasis di periode antar Perang Dunia, yang mengedepankan mobilisasi kekuatan massa, partai-partai baru kanan-jauh memutuskan untuk masuk ke dalam sistem politik dan bertarung dalam Pemilu. Dengan mengikuti pemilu, mereka mencoba masuk ke dalam arus politik utama untuk menawarkan platform baru yang bersifat populis dalam upaya mewujudkan kebijakan mereka yang berbasis nasionalisme; anti nilai liberal dan komunis; anti imigran; dan tidak toleran pada kelompok minoritas (Kallis, 2014). Ada tiga partai yang dianggap sebagai cikal bakal politik kanan-jauh paska Perang Dunia II, yaitu: *National Front* (FN) di Prancis, *Flemish Block* (FB) di Belgia, dan *Freedom Party of Austria* (FPÖ) di Austria. Partai-partai ini mulai mendapatkan suara yang signifikan di akhir dekade 1980-an dan awal 1990-an dengan semakin derasnya arus imigrasi di Eropa yang dijadikan salah satu sarana untuk melemparkan kembali wacana ultra-nasionalis. Pada dekade 1990-an partai kanan-jauh semakin berkembang luas ke negara lain,

seperti: *Northern League* (LN) di Italia; *the Republicans*, di Jerman, dan *Swedish Democrats*, di Swedia.

Kelima, periode paska Perang Dingin dimana gerakan kanan-jauh semakin menemukan tempatnya dalam politik Eropa. Hal ini tercermin dengan kemunculan partai-partai kanan-jauh di beberapa negara Eropa yang mampu mendapatkan suara signifikan dalam Pemilu lokal, nasional, dan regional. Tidak sedikit dari partai-partai tersebut yang mampu memperoleh suara signifikan, baik dalam Pemilu lokal, nasional dan regional. Bahkan *Northern League* (LN) di Italia berhasil menjadi partai terbesar keempat di Italia pada Pemilu 1992 dan menjadi bagian dari pemerintahan Silvio Berlusconi paska Pemilu 1994. Sementara FPÖ bergabung ke dalam pemerintahan Austria pada tahun 1999 dan 2002. Momentum bagi partai-partai kanan-jauh terjadi pada Pemilu Eropa 2014 ketika mereka mampu meraih jumlah kursi yang signifikan (lihat tabel 1).

Tabel 1. Partai Kanan-Jauh Paska Pemilu Eropa 2014 dan Pemilu Nasional

Negara	Sistem kekuasaan	Agama Mayoritas <i>Encyclopedia of World Constitutions</i>	Pendapatan Perkapita (US\$) <i>Versi World Bank</i>
Singapura	Republik	Buddha (42.5%)	57.238
Brunei	Monarki	Islam (67%)	47.200
Malaysia	Monarki Konstitusional	Islam (60.4%)	14.603
Thailand	Monarki Konstitusional	Buddha (94.6%)	8.643
Indonesia	Republik	Islam (86.1%)	4.380
Filipina	Republik	Katolik (82.9%)	3.725
Vietnam	Republik Sosialis	Atheis (80.8%)	3.725
Laos	Republik Sosialis	Buddha (67%)	2.435
Myanmar	Oligarki Militer	Buddha (89%)	1.900
Kamboja	Monarki Konstitusional	Buddha (96.4%)	1.246

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Jumlah perolehan kursi di atas belum ditambah suara calon independen terpilih yang memiliki ideologi kanan-jauh. Dari Pemilu nasional, beberapa partai memiliki suara signifikan, seperti: FPÖ, DF, PS, XA, Jobbik, LN, NA, TT, PVV, dan SD. Bahkan PVV telah masuk ke dalam koalisi pemerintahan di Belanda. Sementara FN di Prancis, FPÖ di Austria, SD di Swedia memiliki potensi berkuasa pada Pemilu berikutnya.

Namun banyaknya partai kanan-jauh yang muncul saat ini tidak menandakan mereka berada dalam satu pemikiran yang sama. Kenyataannya, semakin berkembangnya gerakan kanan-jauh dalam wacana sosial, politik, dan ekonomi di Eropa menyebabkan munculnya gesekan-gesekan secara pemikiran. Di sini mulai tampak perbedaan-perbedaan di antara mereka dalam upaya mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan. Oleh karenanya dalam tubuh kanan-jauh terdapat heterogenitas dalam hal pemikiran dan implementasi kebijakan di dalam masyarakat. Hal ini pula yang menyebabkan ide Jean Marie Le Pen terkait pembentukan Euro-Nat, wadah persatuan partai-partai kanan-jauh di Eropa, di akhir dekade 1990-an belum bisa direalisasikan hingga saat ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, setidaknya ada dua tipe politik kanan-jauh yang saat memainkan peranan signifikan dalam politik Eropa. *Pertama*, partai kanan-jauh dengan pendekatan radikal yang memiliki karakter otoritarianisme dan nativisme. Contoh dari partai ini adalah FN dan *Freedom Party of Austria* (FPÖ) dimana mereka menolak demokrasi plural serta mempromosikan moral tradisional dan nilai agama (Mudde, 2007: 294-298). *Kedua*, partai kanan-jauh dengan pendekatan ekstrim yang bersifat eksklusif dan mengarahkan fokus kebijakan pada imigran, pengungsi dan minoritas. Contoh dari partai ini adalah NPD Jerman dan *Golden Dawn* Yunani. Di beberapa negara partai tipe ini masuk dalam kategori terlarang karena memiliki kebijakan diskriminatif, seperti yang dialami Partai Nasional

Britania (BNP) yang awalnya tidak mengizinkan warga yang bukan kulit putih untuk menjadi anggota (Hamilton, 2009).

Perbedaan pemikiran dan kebijakan ini tercermin dalam Parlemen Eropa dimana partai-partai kanan-jauh tidak berada dalam satu koalisi yang sama. Contohnya adalah dengan dibentuknya *Europe Nations and Freedom* (ENL) pada tahun 2015 sebagai hasil dari Pemilu Eropa 2014. Kelompok ini dibentuk oleh *National Front* (FN) Prancis dan didukung oleh *Freedom Party of Austria* (FPÖ), *Party for Freedom* (PVV) Belanda, *Northern League* (LN) Italia, *Vlaams Belang* (VB) Belgia, *Alternative for Germany* (AfD) Jerman, *Congress of the New Right* (KNP) Polandia, dan dua anggota parlemen independen dari Rumania dan Inggris Raya. Kelompok ini tidak memasukkan Partai Jobbik di Hungaria yang anti-semit dan *Golden Dawn* di Yunani yang seringkali melakukan tindak kekerasan dalam aksinya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari persepsi negatif dari para pemilih, khususnya yang tidak menginginkan praktik kekerasan untuk memperoleh kekuasaan.

Kendatipun memiliki perbedaan-perbedaan kelompok kanan-jauh tetap memiliki kedekatan yang kuat. Setidaknya isu-isu yang mereka angkat tetap berada dalam jalur yang sama, seperti: imigrasi, pengetatan ekonomi, dan *euro-skepticism*. Mereka pun memiliki 'musuh' yang sama dalam tubuh politik tengah-kanan, tengah-kiri, dan kiri-jauh. Sehingga wacana pembentukan jaringan kanan-jauh, sebagaimana yang pernah diusulkan oleh Jean Marie Le Pen, tetap terbuka. Terlebih lagi jika mereka hendak memperkuat identitas diri dan organisasi; memperluas jaringan; dan mengkampanyekan secara masif pemikiran-pemikiran yang dianut dalam wacana masyarakat Eropa. Jika jaringan ini terwujud bukan tidak mungkin mereka akan mampu menggusur hegemoni tengah-kanan dan tengah kiri yang telah berkuasa di Eropa secara silih berganti.

Penyebab Kebangkitan Politik Kanan-Jauh

Eropa adalah kawasan pemikiran. Suatu kawasan dimana bibit-bibit pemikiran dengan mudah tumbuh dan berkembang. Ketika bibit-bibit tersebut telah menjelma menjadi pohon besar yang menakutkan, mereka tidak ragu untuk menebangnya. Namun penebangan tersebut bukan berarti di kemudian hari pohon yang sama tidak akan tumbuh kembali. Hal ini dikarenakan akar dari pohon yang ditebang tetap ada. Apabila akar tersebut mendapatkan air yang cukup, maka bukan tidak mungkin pohon yang telah ditebang tersebut akan kembali tumbuh, walaupun dengan bentuk yang berbeda.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa pemikiran layaknya fasisme, maupun komunisme sekalipun, yang dianggap sejarah telah gagal, sebenarnya tetap hidup dalam bentuk pemikiran. Suatu waktu ketika situasi dan kondisi masyarakat memungkinkan mereka untuk menghiasi wacana publik, maka mereka dengan senang hati akan kembali. Masyarakat Eropa, pada dasarnya, menikmati berbagai macam ide yang muncul untuk menjawab tantangan zaman. Eksperimen-eksperimen dan diskursus pemikiran telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Kebiasaan ini semakin berkembang paska peristiwa *renaissance* hingga hari ini. Sehingga pemikiran-pemikiran ekstrim sekalipun akan diterima dengan baik, selama memiliki argumentasi dan berasal dari tradisi mereka. Itulah sebabnya mengapa fasisimemasih diterima, kendatipun pernah menyebabkan bencana kemanusiaan bagi kawasan Eropa.

Oleh karena itu, kebangkitan gerakan kanan-jauh adalah suatu hal yang wajar karena ide-ide tentang ultra-nasionalis hingga rasisme dan xenophobia memang tumbuh di dalam masyarakat Eropa. Sulit rasanya membicarakan ultra-nasionalis tanpa membahas praktik merkantilisme dan kolonialisme Eropa di masa lalu. Sementara itu bagi kelompok imigran yang berteriak

soal praktik rasial dan xenophobia yang dialamatkan kepada mereka, maka mereka dapat berkaca kepada Etnis Roma yang telah mengalami hal-hal tersebut sejak abad ke-13/14 hingga hari ini.

Hal inilah yang kemudian dianggap Mudde (2010) sebagai '*pathological normalcy*' dimana pemikiran dan tindakan ekstrim merupakan suatu hal yang normal dan memiliki akar di dalam masyarakat. Lebih lanjut, Mudde juga menjelaskan jika pemikiran kanan-jauh merupakan bagian dari arus politik utama. Sehingga perbedaan antara radikalisme dan demokrasi bukan dianggap sebagai suatu antitesis, melainkan sebatas derajat pemahaman yang berbeda. Dimana radikalisme melihat sesuatu dari pendekatan radikal, sedangkan demokrasi melihatnya dari sudut pandang moderat. Dengan pendekatan ini Kallis (2015) kemudian berargumen bahwa pertanyaan yang tepat terkait fenomena partai kanan-jauh di Eropa bukan pada kalimat 'mengapa mereka bangkit dan sukses?' melainkan 'mengapa mereka bisa sukses di waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu?' Artinya ada masa-masa tertentu dimana politik kanan-jauh dapat muncul, berkembang dan diterima masyarakat.

Studi yang dilakukan Kallis (2015) menunjukkan politik kanan-jauh muncul dan berkembang dalam periode krisis. Di masa antar Perang Dunia yang melahirkan fasisme, krisis yang terjadi disebabkan oleh krisis sistem kapitalis dan '*malaise*' yang dialami oleh masyarakat Jerman. Sementara fenomena partai kanan-jauh dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh tiga krisis, yaitu: terorisme internasional yang terjadi paska 9/11; krisis identitas dengan adanya multikulturalisme dan kekhawatiran atas isu migrasi; dan krisis finansial yang mengancam tatanan ekonomi dan sosial masyarakat Eropa.

Persitiwa 9/11 yang disusul dengan teror bom di Madrid dan London memberikan makna tersendiri bagi masyarakat Eropa karena ancaman

senantiasa mengintai karena bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Wacana global yang menuduh pelaku aksi-aksi teror berasal dari kalangan tertentu, yakni Islam atau Muslim, membuat munculnya prasangka yang keliru. Hal ini dikarenakan munculnya generalisasi terhadap Islam sebagai agama teror. Generalisasi tersebut kemudian dikaitkan dengan sikap sebagian besar imigran, khususnya kaum Muslim, di Eropa yang masih membawa budaya asal di tengah masyarakat. Sikap tersebut dianggap sebagai bentuk penolakan, tantangan dan konfrontasi dari para pendatang yang nantinya dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan, budaya, dan pandangan hidup secara nasional yang telah ada (Guibernau dan Rex, 2010). Selain itu, krisis ekonomi dan finansial juga dianggap sebagai dasar adanya sikap curiga dari warga asli Eropa terhadap imigran yang dikhawatirkan akan mengambil alih pekerjaan mereka. Persoalan-persoalan inilah yang kemudian memunculkan sikap tidak percaya kepada para imigran yang nantinya akan menjadi pintu masuk bagi dikotomi 'self' dan 'other' serta konsep nativisme.

Dari tiga krisis di atas, muncul empat variabel lanjutan yang turut meningkatkan popularitas partai kanan-jauh di Eropa. *Pertama*, kegagalan partai-partai utama, tengah-kanan dan tengah-kiri, dalam mengatasi krisis yang ada. Hal ini menyebabkan masyarakat memikirkan kembali pilihan-pilihan yang ada sekaligus membuka peluang bagi munculnya partai alternatif. Momentum inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh partai-partai kanan-jauh untuk kembali masuk ke dalam arus politik utama Eropa. *Kedua*, ketika masuk kembali dalam arena elektoral, partai-partai kanan-jauh berupaya menghindari label sebagai neo-fasis. Dengan melakukan hal tersebut mereka berupaya untuk hadir sebagai bentuk baru yang segar tanpa keterikatan masa lalu yang kelam.

Ketiga, partai kanan-jauh diuntungkan dengan situasi paska industrial yang tidak lagi menekankan pada kepentingan material yang menciptakan

pertentangan kelas seperti yang terjadi di masa lalu (Ignazi, 1996, dikutip oleh Wilson & Hainsworth, 2012).Keempat, adanya agen-agen politik dalam membentuk partai yang kuat secara ideologi dan organisasi; mampu membuat sekaligus menawarkan program-program yang strategis; dan memunculkan tokoh karismatik yang dapat menjadi *vote getter*. Kekuatan internal partai harus dimaksimalkan dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan mengeksploitasi kekurangan lawan (Wilson & Hainsworth, 2012).

Keberhasilan partai kanan-jauh, dalam konteks proses politik, tentu dapat diapresiasi. Hal ini mengingatkan proses politik yang mereka lakukan, mulai dari teralienasi dalam politik utama Eropa paska Perang Dunia II hingga mampu menjelma menjadi kekuatan alternatif dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, fenomena kebangkitan politik kanan-jauh saat ini patut mendapat perhatian bersama. Jika partai-partai kanan-jauh mampu berkuasa, maka mereka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu yang dikhawatirkan dapat membawa dampak-dampak negatif yang akan mempengaruhi dan mengancam stabilitas keamanan Eropa. Salah satu isu yang dapat menjadi pintu masuk bagi destabilisasi kawasan adalah terkait multikulturalisme yang ada di dalam masyarakat Eropa.

Dampak Politik Kanan-Jauh terhadap Multikulturalisme

Dari penjelasan tentang krisis di atas, dapat diterangkan bahwasanya imigrasi seringkali dijadikan 'kambing hitam' oleh partai kanan-jauh. Dalam hal ini mereka mengaitkan keberadaan para imigran sebagai ancaman bagi identitas Eropa. Para imigran memiliki cara pandang dan budaya yang berbeda dan memiliki tendensi untuk tidak meleburkan dirinya dalam khazanah peradaban Barat. Selain itu, partai kanan-jauh juga menganggap jika keberadaan imigran juga dapat mengakibatkan pengangguran bagi

masyarakat Eropa. Kekhawatiran-kekhawatiran yang dibangun oleh partai kanan-jauh kemudian memunculkan wacana untuk membentuk masyarakat Eropa yang ideal melalui konsep nativisme. Mudde (2007) menerangkan yang dimaksud dengan nativisme adalah:

“ An ideology, which holds that states should be inhabited by members of the native group (“the nation”) and that non-native elements (persons and ideas) are fundamentally threatening to the homogenous nation-state. The basis for defining (non) “nativeness” can be diverse, e.g. ethnic, racial or religious, but will always have a cultural element”

Penjelasan Mudde tentang nativisme di atas menekankan adanya kebijakan eksklusionis melalui pembentukan wacana identitas antara ‘*self*’ (diri/kita) dan ‘*other*’ (mereka). Lebih lanjut Mudde (2007) menjelaskan ada empat kategori ‘*others*’ dalam pandangan politik kanan-jauh. *Pertama*, mereka yang berada di luar negara dan bangsa, seperti UE. *Kedua*, mereka yang berada di luar negara, tetapi berada dalam satu bangsa. Termasuk dalam kategori ini adalah para politisi dan intelektual yang bermigrasi ke luar negeri akibat tuduhan korupsi. *Ketiga*, mereka yang berada di dalam negara dan bangsa, seperti para elit ekonomi dan politik yang dikarakterkan sebagai elemen korupsi. *Keempat*, mereka yang dikatakan sebagai imigran yang berada di dalam negara, tetapi di luar bangsa.

Sejak peristiwa 9/11 sosok ‘*other*’ lebih sering diarahkan kepada kelompok Muslim. Partai-partai kanan-jauh memainkan isu ini dengan membangkitkan sentimen masyarakat Eropa akan adanya upaya untuk melakukan Islamisasi Eropa (Amnesty International, 2012). Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa tokoh partai kanan-jauh, seperti Marine Le Pen (FN) yang menyatakan Eropa akan menjadi Republik Islam maupun Geert Wilders (PVV) yang mengklaim Islam sebagai ancaman terbesar bagi kebebasan di Belanda dan seluruh dunia Barat (Amnesty International, 2012).

Diberlakukannya kebijakan penerimaan pengungsi Timur Tengah oleh UE tahun 2015 semakin menimbulkan sikap paranoid bagi orang-orang yang berafiliasi dengan pemikiran kanan-jauh. Terlebih lagi dengan adanya tragedi Charlie Hebdo, bom Paris dan Brussels yang pelakunya berasal dari kelompok imigran. Dampak dari beberapa peristiwa tersebut semakin memperkeruh relasi antara kelompok kanan-jauh dengan para imigran. Bukan tidak mungkin aksi kekerasan terhadap para imigran, atau kelompok pro imigran, seperti yang dilakukan oleh Anders Breivik di Norwegia pada tahun 2011 dapat terulang kembali. Jika hal ini dibiarkan tentu dapat mengancam multikulturalisme di Eropa.

Partai-partai kanan-jauh memang telah menolak ide multikulturalisme seperti yang dikemukakan oleh Marine Le Pen (FN) dimana multikulturalisme adalah mitos. Dalam sebuah wawancara dengan *The Saturday Age*, Le Pen menyatakan bahwa ketika multikulturalisme muncul, maka akan berakhir dengan adanya perang. Lebih lanjut, Le Pen juga mencotohkan beberapa negara dengan konsep multikulturalisme yang berakhir dengan konflik, seperti: Balkan dan Lebanon. Sementara terkait multikulturalisme di AS dan Australia, Le Pen menyatakan yang berlangsung adalah unikultural karena setiap warga negara diminta untuk tunduk pada nilai-nilai yang dianut oleh kedua negara tersebut (*The Sydney Morning Herald*, diakses 13 Agustus 2016).

Namun persoalannya pemimpin Eropa lainnya yang berasal dari spektrum politik tengah juga turut mengatakan bahwa multikulturalisme telah gagal. Pada November 2010 Kanselir Jerman, Angela Merkel, mengatakan multikulturalisme di Jerman telah gagal. Pernyataan tersebut diamini oleh Perdana Menteri (PM) Belgia, Yves Leterme, dalam konteks negaranya. Pernyataan Merkel dan Leterme disusul oleh Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, dan PM Inggris, David Cameron, yang menyatakan

multikulturalisme telah gagal pada Februari 2011. Profesor Olivier Roy, pemikir Islam, turut memperkuat pandangan para pemimpin negara di atas dengan mengatakan baik asimilasi dan multikulturalisme telah gagal (Emerson, 2011). Pernyataan-pernyataan di atas tentu menjadi ironi bagi pendukung multikulturalisme di Eropa sekaligus sebagai dukungan bagi pemikiran kanan-jauh sebagaimana yang diilustrasikan oleh Le Pen.

Multikulturalisme secara praktik dapat ditinjau dari dua pendekatan. Pendekatan *pertama* multikulturalisme yang didasari oleh konsep *cultural essential* dan penolakan atas ide yang menyatakan jika budaya dapat berubah seiring berjalannya waktu dan interaksi yang terjadi dengan orang lain. Dengan pendekatan ini akan dihasilkan koeksistensi antar budaya yang ada di wilayah tertentu. Resikonya, pendekatan ini dapat menghasilkan eksklusivitas kelompok dan sikap protektif. Hal ini akan menyebabkan terbatasnya komunikasi dan pengaruh antar budaya (Ogurlu, 2008).

Pendekatan *kedua* menyatakan multikulturalisme seperti '*melting pot*' yang mengumpulkan budaya-budaya yang ada. Hal ini ditujukan untuk memperkaya budaya-budaya itu sendiri. Hasil interaksi budaya tersebut akan mengarah pada pembentukan budaya kosmopolitan yang terlepas dari pengaruh afiliasi nasional, agama, dan sebagainya. Artinya budaya modern tidak lagi identik dan homogen sehingga keberagaman yang ada bukan menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak hidup berdampingan secara damai. Adapun resiko dari pendekatan ini adalah interaksi budaya yang intens dapat mengganggu keaslian suatu budaya. Resiko ini pada akhirnya dapat mengarah pada *deculturalisation*, walaupun penganut pendekatan ini menyatakan budaya-budaya yang ada tetap akan diperlakukan berbeda satu sama lain dan tidak akan mengalami asimilasi pada budaya dominan (Ogurlu, 2008).

Wacana multikulturalisme di Eropa tidak memiliki kejelasan pendekatan mana yang sebenarnya dipilih. Kendatipun cenderung pada pendekatan kedua, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Penulis berargumen hal ini disebabkan oleh dua hal utama yang berkenaan dengan sikap masyarakat Eropa yang menjalankan multikulturalisme setengah hati. *Pertama*, multikulturalisme awalnya digunakan sebagai sarana untuk menjembatani masyarakat Eropa dengan para imigran yang datang secara berkala paska berakhirnya Perang Dunia II. Hansen (2003) mengatakan bahwa fenomena migrasi di Eropa saat ini terjadi melalui tiga tahap, yaitu: kedatangan pekerja migran dan imigran dari negara bekas jajahan; kedatangan keluarga para imigran; dan arus pengungsi pada dekade 1980-an, terutama setelah 1989.

Pada kenyataannya para pendatang banyak yang memilih untuk mempertahankan budaya aslinya (pendekatan pertama). Hal itu dianggap sebagai suatu hal yang asing oleh sebagian masyarakat Eropa. Perbedaan budaya yang drastis di antara keduanya justru menghasilkan sikap curiga dari sebagian masyarakat Eropa dan sikap yang semakin eksklusif dari sebagian pendatang. Dari sinilah nativisme muncul dan berkembang sehingga menghasilkan konsep '*self*' dan '*other*'. Ketika konsep ini dibiarkan berkembang, maka akan sulit untuk melepaskannya karena telah terikat oleh ruang sejarah.

Kedua, melihat realita di dalam masyarakat, pemerintah-pemerintah di beberapa Eropa kemudian menekankan kembali multikulturalisme. Akan tetapi, konsep multikulturalisme yang diajukan lebih mengarah pada tuntutan terhadap para pendatang untuk mengintegrasikan dirinya pada nilai-nilai yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain apa yang terjadi di Eropa selama ini bukanlah multikulturalisme yang menekankan pada keberagaman layaknya pendekatan pertama maupun kedua, tetapi lebih mengarahkan pada proses asimilasi sebagaimana yang

diajukan oleh Prancis, terutama pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy. Upaya asimilasi tersebut juga mengalami kegagalan karena kembali pada pendekatan pertama dimana budaya yang dianut seseorang tidak bisa berubah begitu saja, apalagi dengan paksaan, seperti dengan menawarkan kewarganegaraan.

Permasalahannya sekarang adalah bukan terletak pada multikulturalisme semata, melainkan pada keberadaan para imigran yang telah menetap lama di Eropa. Jadi sekalipun dapat berandai kelak partai kanan-jauh mampu meraih kekuasaan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang anti multikulturalisme serta imigrasi lantas bagaimana dengan nasib mereka yang telah menetap lama tersebut hingga menghasilkan generasi kedua dan ketiga yang telah lahir dan tumbuh di Eropa yang secara hukum memperoleh hak kewarganegaraan. Tentu hal ini dapat memicu krisis yang lebih besar. Hal inilah yang patut dipikirkan secara seksama, baik oleh negara maupun UE, demi mempertahankan stabilitas keamanan dan mewujudkan perdamaian lestari di Eropa.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat dipahami jika kebangkitan politik kanan-jauh merupakan suatu hal yang normal mengingat latar belakang politik kanan-jauh yang berasal dari tradisi pemikiran politik arus utama di Eropa. Adapun mengenai sejarah politik kanan-jauh yang kelam tidak menjadi persoalan mengingat upaya partai-partai kanan-jauh saat ini yang menjaga jarak dengan pemikiran dan bentuk gerakan kanan-jauh (fasisme) di masa lalu. Selain itu, perubahan situasi dan kondisi politik Eropa, terutama yang terkait isu keamanan, migrasi, dan ekonomi, dalam dua dekade terakhir menyebabkan wacana pemikiran yang mereka ajukan dianggap relevan dan mampu menjadi alternatif bagi partai-partai tengah yang selama ini belum

mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di Eropa, khususnya paska peristiwa 9/11 dan krisis ekonomi finansial tahun 2008.

Kebangkitan partai kanan-jauh Eropa dalam beberapa tahun terakhir memiliki dampak bagi masa depan multikulturalisme. Namun isu multikulturalisme sebenarnya bukan permasalahan baru yang muncul, melainkan telah ada sejak lama. Bahkan beberapa partai tengah sendiri telah menganggap jika multikulturalisme di Eropa telah gagal. Jadi kebangkitan partai kanan-jauh hanya akan mendorong isu ini untuk tampil ke permukaan dan menjadi wacana aktif dalam masyarakat Eropa dengan meng-arahkannya pada isu-isu tradisional yang mereka usung, seperti imigrasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Amnesty International Report. (2012). *Choice and Prejudice: Discrimination against Muslims in Europe*. London: Amnesty International.
- Emerson, Michael. (Ed). (2011). *Interculturalism: Europe and Its Muslims in Search of Sound Societal Models*. Brussels: The Centre for European Policy Studies.
- Guibernau, Montserrat dan Rex, John (Eds). (2010). *The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migration*. London: Polity Press.
- Kallis, Aristotle. (2014). *The Radical Right in Contemporary Europe*. Istanbul: SETA.
- Mudde, Cas. (2007). *Populist Radical Right Parties*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stackelberg, Roderick. (2007). *A Routledge Companion to Nazi Germany*. London: Routledge.
- Williams, M. H. (2006). *The Impact of Radical Right-Wing Parties in West European Democracies*. New York: Palgrave Macmillan.

Wilson, Robin, dan Hainsworth, Paul. (2012). *Far Right Parties and Discourse in Europe: A Challenge for Our Time*. Brussels: European Network Against Racism (ENAR).

Jurnal

Hansen, Randal. (2003). "Migration ton Europe since 1945: Its History and Its Lessons." *The Political Quaterly*. Vol. 74 (1).

Mudde, Cas. (2010). "The Populist Radical Right: A Pathological Normalcy." *West European Politics*. Vol. 33 (6).

Mudde, Cas. (2013). "The 2012 Stein Rokkan Lecture: Three Decades of Populist Radical Right Parties in Western Europe: So What?" *European Journal of Political Research*. Vol. 52.

Ogurlu, Ebru. (2008). "Multicultural Europe?" *Marmara Journal of European Studies*. Vol. 16 (1-2).

Swyngedouw, Marc, dan Ivaldi, Gilles. (2001) "The Extreme Right Utopia in Belgium and France: The Ideology of the Flemish Vlaam Blok and the French National Front," *West European Politics*. Vol. 24 (3).

Zuquete, J. P. (2008). "The European Extreme-Right and Islam: New Directions?" *Journal of Political Ideologies*. Vol. 13 (3).

Website

BBC. (2016). "Austria Far-Right Candidate Norbert Hofer Defeated in Presidential Poll." <http://www.bbc.com/news/world-europe-38202669>, diakses pada 6 Desember 2016.

Human Right First. (2016). "Far Right Parties in European Election" <http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/March2016Far-rightPartiesintheEuropeanElections.pdf>, diakses 8 Agustus 2016.

- Kallis, Aristotle. (2015). "A Thin Red Line? Far Right and Mainstream in A Relational Perspective," dalam Charalambous, Giorgos. (ed). (2015). *The European Far Right: Historical and Contemporary Perspectives. Report 2/2015.* http://file.prio.no/publication_files/cyprus/Far%20Right%20Report.pdf, diakses pada 8 Agustus 2016.
- The Economist. (2014). "The National Front's Victory: France in Shock." <http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2014/05/national-fronts-victory>, diakses pada 8 Agustus 2016.
- The Sydney Morning Herald. "Multiculturalism is a Myth: Le Pen," <http://www.smh.com.au/world/multiculturalism-is-a-myth-le-pen-20110311-1brbs.html>, diakses pada 13 Agustus 2016.

